

### **BAB III**

## **SEJARAH DAN BERKEMBANGNYA ISU KAMPANYE NEGATIF DAN MUNCULNYA RESOLUSI MINYAK SAWIT UNI EROPA**

Dewasa ini kerusakan lingkungan telah menjadi masalah yang serius, hal ini dikarenakan dapat dianggap buruk karena telah banyak memberikan dampak yang negatif, tidak hanya dari segi ekosistem, keanekaragaman hayati, namun juga terhadap lingkungan sekitar. Kerusakan lingkungan tersebut kemudian dilakukan dengan alasan pembukaan lahan untuk kepentingan individu. Salah satunya adanya dengan pembukaan lahan untuk perkebunan yang selama ini dicurigai sering dilakukan. Minyak sawit sebagai salah satu sektor perkebunan tentunya dikaitkan oleh akibat dari adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perluasan lahan industri minyak sawit dan tidak bertanggung jawab pada lingkungan didalam prosesnya.

Oleh sebab itu, pada bab ini akan dibahas mengenai perkembangan deforestasi (penggundulan hutan) khususnya di Indonesia, munculnya resolusi minyak sawit Uni Eropa serta dampak yang diakibatkan oleh adanya isu atau kampanye negatif mengenai kerusakan lingkungan.

#### **A. Sejarah Berkembangnya Deforestasi di Indonesia**

Faktor perubahan iklim serta faktor manusia juga turut menyumbang dalam kerusakan lingkungan saat ini. Perubahan lingkungan yang terjadi saat ini menyebabkan lingkungan menjadi tidak sesuai untuk mendukung kehidupan manusia kedepannya. Kerusakan lingkungan yang terjadi dikarenakan eksplorasi sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Selain itu, deforestasi menjadi salah satu yang mendukung adanya isu lingkungan. Tren isu deforestasi biasanya disebabkan oleh adanya kerusakan lingkungan seperti halnya, penebangan hutan ataupun pembakaran hutan yang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Kini deforestasi

menjadi isu lingkungan global karena selain menjadi sumber emisi GHG juga dapat mengancam keanekaragaman hayati.

*Deforestation* secara umum merupakan penebangan hutan atau penggundulan hutan. Dapat diartikan bahwa deforestasi adalah konversi hutan menjadi penggunaan lahan lain atau pengurangan jangka panjang.<sup>1</sup> Penebangan hutan dan penegakan pohon disuatu dikawasan hutan dialihgunakan untuk perluasan pertanian, perkebunan dan bahkan kawasan perkotaan termasuk kegiatan dari deforestasi. Hal tersebut merupakan langkah buruk dimana dapat merusak lingkungan, sebagaimana pada umumnya bahwa hutan merupakan paru-paru bagi dunia, jika deforestasi muncul dan berkembang semakin luas disetiap hutan tentunya akan menimbulkan efek yang merugikan baik dari segi perubahan alam maupun manusia. Pada awalnya deforestasi dapat disalah artikan sebagai bagian dari kapitalisme. Bagaimana tidak, deforestasi dilakukan pada umunya untuk memperoleh keuntungan seperti halnya pembukaan lahan, demi membangun sebuah perkebunan.

Deforestasi dikhawatirkan merupakan akibat dari suatu sistem politik dan ekonomi yang korup, yang telah menganggap sumber daya alam khususnya hutan sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi. Selama ini masalah lingkungan global banyak dipengaruhi faktor alam, seperti iklim, yang mencakup, curah hujan, kelembaban, tekanan udara. Namun, jika disadari bahwa aktifitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan. Seperti halnya, penebangan hutan yang dapat mempengaruhi perubahan iklim dan curah hujan secara lokal. Ketika semula area hutan yang hilang semakin luas, maka akibat yang ditimbulkan bukan lagi lokal namun akan berskala regional. Perkembangan deforestasi ini sudah terjadi diseluruh negara-negara dunia untuk memenuhi kebutuhan lahan seperti pembangunan.

---

<sup>1</sup> <http://wwf.panda.org>, dalam "Deforestation", (diakses pada 16 Februari 2018, pukul 01:00)

Termasuk Eropa dan Amerika Utara. *Studi Mathew (1983)* mengungkapkan bahwa dalam periode 1600-1983, luas deforestasi di subtropis khususnya Eropa dan Amerika Utara telah mencapai 653 juta hektar. Dapat dikatakan bahwa sejarah adanya deforestasi telah terjadi sejak dahulu kala, diperkirakan sudah ada sejak zaman berburu (*hunting ages*) hingga masa pertanian menetap dan telah komersial hingga pada zaman modern saat ini.<sup>2</sup> Dalam sebuah Konferensi Internasional tentang lingkungan dan pembangunan sedang dipersiapkan yang akan diadakan di Brazil pada pertengahan tahun 1992. Indonesia sebagai salah satu anggota PPB harus mengikuti konferensi tersebut.<sup>3</sup> Hal tersebut berkaitan dengan kewajibannya untuk ikut menyelamatkan dunia dari dampak lingkungan. Dalam persiapannya pun mencakup bidang kehutanan, khususnya masalah “*deforestation*” dan keanekaragaman hayati.

Diharapkan dalam konferensi tersebut Indonesia dalam meminimalisir adanya isu atau kampanye negatif mengenai lingkungan kerusakan hutan nasional dan serta mengurangi resiko terjadinya masalah lingkungan yang dikhawatirkan. Maka oleh sebab itu, pentingnya keberadaan hutan Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Karena puluhan juta rakyat kehidupannya secara langsung bergantung pada hutan. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan seperti yang tertera didalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999.<sup>4</sup> Hutan menutup sekitar sepertiga permukaan Bumi dan menjadi rumah bagi dua pertiga spesies darat di seluruh dunia. Maka, wajar apabila kemudian keberadaan hutan disebut sebagai gudangnya keanekaragaman hayati.

---

<sup>2</sup> <https://gapki.id>, dalam Resolusi minyak sawit Uni Eropa dan Isu Deforestasi, (diakses pada 10 Maret 2018, pukul 14:27)

<sup>3</sup> Otto Soemarwoto, *Indonesia dalam kancah isu lingkungan global*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991) hlm. 285

<sup>4</sup> [www.bpn.go.id](http://www.bpn.go.id), dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999”, (diakses pada 18 Februari 2018, pukul 18:03)

Hal tersebut yang menjadikan hutan sebagai elemen yang penting di beberapa aspek. Seperti halnya, sumber O<sub>2</sub> (oksigen), mencegah banjir dan erosi bahkan juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut data PBB, lebih dari 1,6 miliar orang di dunia bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka.<sup>5</sup> Apabila dilihat dari pentingnya arti keberadaan sebuah hutan, pada tanggal 21 Maret majelis umum dewan PBB terdorong untuk mendeklarasikannya sebagai Hari Hutan Sedunia atau International Day of Forest. Ini merupakan salah satu upaya global untuk menyebarluaskan pada publik tentang pentingnya hutan dan nasib hutan di seluruh dunia. Yang mana nantinya akan diharapkan bagi seluruh masyarakat dunia dapat ikut andil tidak hanya menjaga hutan, namun ikut serta dalam merawat, dan melestarikan hutan.

Latar belakang utama PBB seperti yang telah dilansir “meningkatkan kesadaran akan pentingnya hutan bagi masyarakat dan peran vital mereka dalam pemberantasan kemiskinan, kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan. Pengelolaan yang berkelanjutan dari semua jenis hutan merupakan inti agar dapat membuka tantangan dari negara-negara yang terkena dampak konflik, berkembang dan maju, untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan”.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, hutan dikatakan sebagai paru-paru dunia jika dilihat dari banyak fungsi yang menjadikan hutan sangatlah penting bagi kehidupan. Salah satu negara yang juga memiliki kawasan hutan yang luas adalah Indonesia, kawasan hutan yang mencapai 884.950 km<sup>2</sup>. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang tergolong hutan hujan tropis.

Hutan hujan tropis pada umumnya hanya berada di kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, wilayah Afrika terutama kongo sekitarnya serta pada wilayah lembah

---

<sup>5</sup> <http://nationalgeographic.co.id>, dalam “10 Alasan Mengapa Hutan Penting Bagi Kehidupan, (diakses pada 18 Februari 2018, pukul 19:43)

<sup>6</sup> <http://www.un.org>, dalam “International Day of Forests 21 March, (diakses pada 18 Februari 2018, pukul 20:01)

sungai amazon yang meliputi negara brazil. Hujan hujan tropis adalah daerah yang ditandai oleh tumbuh-tumbuhan subur dan rimbun serta curah hujan dan suhu yang tinggi sepanjang tahun. Hutan hujan tropis adalah bentuk yang paling tinggi perkembangannya dan paling kompleks diantara semua bentuk hutan.<sup>7</sup> Dalam konteks pengelolaan hutan, ekosistem hutan hujan tropis memiliki peranan penting baik dari segi ekologi maupun ekonomi. Pengelolaan hutan hujan tropis di Indonesia telah berlangsung pada periode tahun 1970 sampai dengan sekarang. Dalam kurun waktu tersebut, terdapat berbagai indikator kelestarian hutan hujan tropis yang menunjukkan trend cenderung menurun.

Hal ini diperkuat dengan adanya pengurangan tutupan hutan hujan tropis pada kawasan lindung dan area pelestarian alam selama periode 1984 sampai dengan 2000, dengan kisaran rata-rata mencapai 31,04 % dan 31,33 %.<sup>8</sup> Terjadinya pengurangan tutupan hutan tropis tersebut disebabkan oleh tingginya laju deforestasi yang mencapai 1,08 juta hektar per tahun. Laju deforestasi yang tinggi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain eksploitasi sumberdaya hutan yang berlebihan, bencana alam berupa kebakaran, dan berlangsungnya alih fungsi lahan hutan menjadi area penggunaan lain.<sup>9</sup> Deforestasi hutan tropis dan konversi hutan menjadi sistem penggunaan lahan lainnya merupakan salah satu alasan penting terhadap hilangnya keanekaragaman hayati. Hal tersebut dikhawatirkan nantinya akan memberikan dampak negatif pada hutan itu sendiri dan lingkungan. Dan pada kenyataannya dengan adanya deforestasi tersebut dapat memberikan dampak yang negatif seperti halnya dengan meningkatnya permasalahan terkait bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan dan lain sebagainya.

---

<sup>7</sup> <http://repository.ipb.ac.id>, jurnal "Hutan Hujan Tropis", (diakses pada 17 Februari 2018, pukul 00:02)

<sup>8</sup> [etd.repository.ugm.ac.id](http://etd.repository.ugm.ac.id), jurnal "Latar belakang hutan hujan tropis", (diakses pada 21 Februari 2018 pukul 15:13)

<sup>9</sup> <http://fwi.or.id>, dalam "Hutan Indonesia yang terus tergerus", (diakses pada 21 Februari 2018 pukul 15:28)

Salah satu negara yang memiliki angka deforestasi cukup tinggi ialah Indonesia. Menurut, Forest Watch Indonesia (2001) menyebutkan bahwa Indonesia kehilangan hutan telah mencapai angka 60 juta ha dengan laju kerusakan 1,6 juta ha pertahun dan Indonesia termasuk salah satu negara tertinggi untuk tingkat deforestasi. Apabila kembali pada tahun tahun sebelumnya sejak tahun 1970 penggundulan hutan mulai marak di Indonesia. Pada tahun 1997-2000, laju kehilangan dan kerusakan hutan Indonesia mencapai 2,8 juta hektar/tahun. Saat ini diperkirakan luas hutan alam yang tersisa hanya 28%.<sup>10</sup> Berdasarkan analisis interpretasi tutupan hutan alam yang dilakukan oleh FWI, sampai tahun 2013 luas tutupan hutan alam hanya tinggal 82 juta hektare atau sekitar 46 persen dari luas daratan Indonesia dan 62,6 persen dari total luas kawasan hutan. Lebih dari setengah (51 persen) luas hutan alam Indonesia pada tahun 2013 tersebar di 3 (tiga) provinsi saja, yaitu Papua, Kalimantan Timur dan Papua Barat.

Delapan provinsi yang memiliki tutupan hutan terluas yaitu: Provinsi Papua dengan luasan sekitar 25 persen dari luas hutan Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur<sup>2</sup> sekitar 15 persen, Provinsi Papua Barat sekitar 11 persen, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar 9 persen, Provinsi Kalimantan Barat sekitar 7 persen, 5 persen di Provinsi Sulawesi Tengah sekitar 5 persen, Provinsi Aceh sekitar.<sup>11</sup> Tutupan hutan tersebut tentunya memberikan dampak negatif yang mengakibatkan hilangnya tutupan hutan secara masif dan kerusakan hutan merupakan kelanjutan yang telah mulai terjadi di Indonesia sejak awal tahun 1970-an. Jika kembali ke tahun 80-an kerusakan hutan (deforestasi) telah marak dan berkembang Indonesia, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Berdasarkan data Kementerian Kehutanan pada periode 1985-1997 pengurangan luas hutan di Indonesia adalah sebesar 22,46 juta hektare atau sebesar 1,87 juta hektare/tahun.

---

<sup>10</sup> <https://www.wwf.or.id>, dalam “Deforestasi” Mei 2009, (diakses pada 21 Februari 2018 pukul 15:39)

<sup>11</sup> <http://fwi.or.id>, dalam “Intip Hutan”, (diakses pada 21 Februari 2018 pukul 8:57)

Akan tetapi pada periode 1997-2000 meningkat tajam menjadi 2,84 juta hektare /tahun. Pada tahun 2011, FWI melalui laporan Potret Keadaan Hutan Indonesia periode 2000-2009 menjelaskan bahwa laju kerusakan hutan masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 1,5 juta hektare dalam kurun waktu tahun 2000-2009. Matt Hansen dari University of Maryland, menyatakan bahwa Indonesia kehilangan tutupan hutan sebesar 15,8 juta hektare antara tahun 2000 dan 2012, peringkat kelima di belakang Rusia, Brasil, Amerika Serikat, dan Kanada dalam hal hilangnya hutan. Bahkan, Indonesia pernah tercatat dalam Guinness Book Of World Records pada awal tahun 2000-an sebagai negara tropis dengan dengan laju deforestasi tertinggi didunia, yang setiap tahunnya terjadi kerusakan hutan sekitar 2 juta hektar. Dengan demikian semakin pesatnya laju deforestasi yang dialami, kini justru Indonesia mendapatkan tantangan dari berbagai LSM (lembaga swadaya masyarakat). Adanya isu kerusakan lingkungan tersebut justru dikaitkan dengan permasalahan perluasan lahan untuk membuka berbagai perkebunan.

Keberhasilan perekonomian Indonesia dari tahun 1980-an dan 1990-an dikhawatirkan telah didasarkan pada kehancuran ekologis dan penyalahgunaan hak. Sebagai contohnya, salah satu sektor yang paling cepat berkembang ialah industri pulp dan kertas, serta minyak sawit. Yang mana penghasil dari produksi tersebut sebagian besar bergantung pada pembukaan hutan alam. Sebagai salah satunya minyak sawit merupakan komoditas andalan di Indonesia karena kontribusinya yang dapat menunjang perekonomian. Perkembangan minyak sawit di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sejak awal produksi tahun 1970 hingga 1980-an. Namun sangat disayangkan dibalik kesuksesan komoditas minyak sawit, justru Indonesia kini harus mendapat berbagai tantangan baik dari LSM baik nasional maupun internasional yang pro terhadap lingkungan. Dikarenakan adanya trend perluasan lahan terhadap produksi minyak sawit yang dicurigai melalui perluasan lahan telah diakibatkan adanya deforestasi.

Oleh sebab itu, beberapa ada yang menyimpulkan bahwa minyak sawit dalam pengembangannya diperoleh dari produksi yang tidak sehat. Oleh sebab itu, laju pesatnya sebuah produksi yang semakin meningkat serta diikuti ekspor yang terus meningkat pula hal tersebut justru dikaitkan dengan adanya isu deforestasi atau kerusakan lingkungan, yang mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang penyumbang deforestasi. Pengembangan minyak sawit telah diklaim sebagai penyebab dari terjadinya deforestasi, serta kehilangan keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Sehingga, isu deforestasi tersebut berkembang hingga semakin banyak memunculkan kampanye-kampanye negatif terhadap persawitan Indonesia baik dari berbagai kalangan misalnya LSM, Organisasi dll baik nasional maupun internasional. Justru nantinya akan semakin memicu adanya berbagai pandangan dari publik internasional.

Isu atau kampanye deforestasi tersebut tentunya semakin marak dan berkembang, yang awal mulanya hanya sekedar isu deforestasi yang dikemukakan para LSM kemudian adanya kampanye hitam yang telah vulgar di negara-negara bagian Eropa ini tentunya menjadi ancaman bagi masa depan eksistensi minyak sawit baik domestik maupun internasional.

## **B. Munculnya resolusi minyak sawit Uni Eropa**

Adanya isu tersebut mengemuka bahwa produksi kelapa sawit yang terus mengalami peningkatan di Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, antara lain pemusnahan beberapa spesies, serta perubahan iklim. Isu-isu ini dikhawatirkan nantinya akan berdampak pada tidak stabilnya ekspor minyak sawit mentah (CPO) dipasar global. Namun, dicurigai dibalik itu semua awal mulanya timbul isu-isu deforestasi minyak sawit diduga berasal dari negara-negara barat (terutama Eropa dan Amerika) membuat kampanye negatif (black campaign) dengan menyatakan bahwa minyak kelapa sawit tidak baik untuk kesehatan. Dengan mereka melihat akibat adanya



eksploitasi kebun sawit yang berdampak pada lingkungan sekitar. *Negative Campaign* itu dinilai berpotensi mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar dan berdampak pada perekonomian nasional.

Jika dikaitkan dengan kampanye negatif yang dilontarkan negara barat melalui LSM disebabkan minyak nabati mereka kalah bersaing dengan minyak sawit, sehingga terus-menerus menyerang produk hasil perkebunan Indonesia. Sebagai tanggapan keras dari UCS, pendukung kami, organisasi sekutu kami, dan masyarakat, mengupayakan semakin banyak perusahaan konsumen. Amerika telah mengadopsi komitmen untuk membeli kelapa sawit bebas gundul dan bebas gambut. Datangnya tuduhan hal hal buruk terhadap minyak sawit ternyata sudah diberkembang sejak tahun 1990-an yang menyatakan bahwa minyak sawit sebagai penyebab penyakit jantung dan pembuluh darah. Namun tuduhan tersebut akhirnya dipatahkan oleh beberapa ahli gizi termasuk dari negara barat yang menyatakan bahwa tudingan tersebut tidak benar adanya.

Namun, tudingan terhadap minyak sawit tidak berhenti sampai disitu, pada tahun 2000-an hingga sampai saat ini kembali marah adanya kampanye negatif “anti sawit” yang bahwa perkebunan kelapa sawit telah merusak lingkungan dan penyebab dari adanya pemanasan global.<sup>12</sup> Hingga untuk membangun citra buruk minyak sawit di pasar dunia, lembaga swadaya masyarakat yang tergolong kedalam anti sawit sering melontarkan tuduhannya terhadap minyak sawit yang terkait dengan deforestasi. Pada hingga kenyataannya kampanye negatif telah banyak mengambil perhatian dari publik Internasional. Bagaimana tidak, jika pada pengolahan produksi minyak sawit Indonesia yang ternyata banyak melibatkan kerusakan lingkungan sehingga selain menghasilkan minyak sawit yang tidak sehat, maka pula adanya kerusakan lingkungan dalam perluasan lahan areal perkebunanya.

---

<sup>12</sup> <https://gapki.id>, dalam “Kampanye Anti Sawit: Praktek Busuk Bisnis Minyak Nabati Barat”, (diakses pada 11 Maret 2018, pukul 17:00)

Isu kerusakan lingkungan tersebut semakin kuat karena adanya opini dari beberapa negara termasuk negara pengimpor minyak sawit. Termasuk Eropa, yang berpendapat mengenai produksi minyak sawit. Pada tahun 2011, Uni Eropa (EU) memberlakukan EU Directive mengenai ketentuan emisi rumah kaca. Dalam aturannya telah disebutkan bahwa Uni Eropa tidak boleh mengimpor minyak sawit mentah untuk biofuel karena komoditas ini dianggap tidak memenuhi ketentuan pembatasan emisi, dan pada akibatnya minyak sawit mentah akan sulit untuk memasuki pasar Eropa.<sup>13</sup> Mulanya negara-negara barat (terutama Eropa dan Amerika) membuat kampanye negatif (black campaign) dengan menyatakan bahwa minyak kelapa sawit tidak baik untuk kesehatan. Misalnya, Center for Science in the Public Interest (CSPI) di Amerika Serikat pada tahun 2005 mengemukakan bahwa minyak kelapa sawit dapat menimbulkan serangan jantung karena mengandung lemak jenuh yang tinggi.

Greenpeace (2007) menggunakan istilah “Industri minyak kelapa sawit memasak iklim” yang berarti merujuk pada pengertian bagaimana persediaan karbon lahan gambut Indonesia sedang dihabiskan melalui pengembangan minyak sawit.<sup>14</sup> Selain adanya respon dari publik baik nasional maupun internasional. Perusahaan-perusahaan multinasional yang seperti Unilever yang dahulunya bermitra dengan perusahaan minyak sawit nasional, bahwa Unilever sebelumnya menjadi pembeli terbesar minyak kelapa sawit dunia. Kini telah menghentikan importir minyak sawit dari Indonesia (dari perusahaan Sinar Mas), dengan alasan dikarenakan memutuskan hubungan dengan pemasok minyak sawit Indonesia yang dituduh menghancurkan hutan hujan tropis seperti yang dilansir oleh organisasi lingkungan

---

<sup>13</sup> Marsha Dewi Putri, *Analisis Dampak Black Campaign Minyak Kelapa Sawit (Cpo) Terhadap Volume Ekspor Cpo Indonesia*, Bogor 2013, 8.

<sup>14</sup> <http://pse.litbang.pertanian.go.id>, Bambang Dradjat, Upaya mengatasi black campaign kelapa sawit dan langkah strategis kedepan, (diakses pada 11 Maret 2018, pukul 18:07)

Greenpeace.<sup>15</sup> Bahkan adanya lebelisasi dari produk-produk Barat yang menggunakan POF (Palm oil free), yang tentunya hal tersebut akan mengancam masa depan minyak sawit.

Namun, isu mengenai deforestasi minyak sawit tidak pernah berhenti. Tak lama kemudian Parlemen Uni Eropa telah mengeluarkan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit pada April 2017 lalu. Resolusi tersebut dikeluarkan, karena dinilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pada 20 Maret 2017 Uni Eropa, yang mana dilansir bahwa adanya berita mengenai resolusi mengenai *on palm oil and deforestation of rainforests* yang mana Indonesia juga termasuk didalam masalah kerusakan lingkungan. Resolusi sawit ini diajukan atas dasar pada tuduhan bahwa pengembangan industri kelapa sawit menjadi penyebab utama deforestasi dan perubahan cuaca. Beberapa poin yang menyatakan bahwa minyak sawit Indonesia merusak lingkungan, sebagai berikut:

1. Kebakaran hutan pada tahun 2015 di Indonesia dan Borneo adalah yang terburuk yang diamati selama hampir dua dekade dan terjadi sebagai akibat perubahan iklim global, perubahan penggunaan lahan dan penggundulan hutan; sedangkan kondisi yang sangat kering di daerah yang bersangkutan cenderung menjadi peristiwa yang lebih umum di masa depan, kecuali tindakan terpadu dilakukan untuk mencegah kebakaran;
2. Kebakaran hutan di Indonesia dan Borneo memaparkan 69 juta orang terhadap polusi udara yang tidak sehat dan bertanggung jawab atas ribuan kematian dini;
3. Kebakaran di Indonesia biasanya merupakan akibat dari pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan keperluan pertanian lainnya; Sementara 52% kebakaran di Indonesia pada

---

<sup>15</sup> <http://news.liputan6.com>, dalam “Unilever Putus Pasokan Minyak Sawit Indonesia”, (diakses 11 Maret 2018, pukul 18:20)

tahun 2015 terjadi di lahan gambut yang kaya karbon, menjadikan negara ini menjadi salah satu kontributor terbesar pemanasan global di Bumi;

4. Tidak adanya peta konsesi kelapa sawit yang akurat dan pendaftar lahan publik di banyak negara produsen membuat sulit untuk menentukan tanggung jawab atas kebakaran hutan<sup>16</sup>

Namun, adanya kampanye negatif maupun resolusi minyak sawit oleh Uni Eropa dibantah oleh Indonesia. Dikarenakan hal tersebut diklaim merupakan perang dagang ataupun bentuk diskriminatif terhadap minyak sawit. Sedangkan dibalik resolusi tersebut adanya unsur bahwa Eropa ingin mempertahankan eksistensi minyak nabati. Seperti yang dilansir oleh Kementerian Luar Negeri bahwa, Resolusi Parlemen Eropa tentang Palm Oil and Deforestation of Rainforests yang disahkan melalui pemungutan suara pada sesi pleno di Strasbourg pada tanggal 4 April 2017 mencerminkan tindakan diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit. Tindakan diskriminatif ini berlawanan dengan posisi Uni Eropa sebagai champion of open, rules based free, and fair trade. Resolusi Parlemen Eropa juga menggunakan data dan informasi yang tidak akurat dan akuntabel terkait perkembangan minyak kelapa sawit dan manajemen kehutanan di negara–negara produsen minyak sawit termasuk Indonesia.

Serta, minyak sawit bukanlah penyebab utama deforestasi. Berdasarkan kajian Komisi Eropa tahun 2013, dari total 239 juta ha lahan yang mengalami deforestasi secara global dalam kurun waktu 20 tahun, 58 juta ha terdeforestasi akibat sektor peternakan (livestock grazing), 13 juta ha dari kedelai, 8 juta ha dari jagung, dan 6 juta ha dari minyak sawit. Dengan kata lain, total minyak sawit dunia hanya berkontribusi kurang lebih sebesar 2,5% terhadap deforestasi

---

<sup>16</sup> <http://www.europarl.europa.eu>, dalam “Report on palm oil and deforestation of rainforests”, pada 20 Maret 2017, (diakses pada 11 November 2017 10:07)

global.<sup>17</sup> Adanya resolusi minyak sawit Uni Eropa tentunya akan menjadi ancaman sekaligus tantangan bagi stabilitas minyak sawit terlebih ekspor minyak sawit. Dikarenakan minyak sawit ini merupakan komoditas andalan Indonesia, sehingga pemerintah penting untuk mempertahankan komoditas tersebut agar dapat mempertahankan stabilitas minyak sawit demi kesejahteraan rakyat. Apabila isu dan kampanye tersebut terus berkembang, maka akan menimbulkan dampak negatif.

### **C. Dampak isu deforestasi terhadap minyak sawit di Indonesia**

Resolusi minyak sawit Uni Eropa tersebut tentu banyak mengambil perhatian publik internasional. Terutama terhadap negara-negara pengimportir minyak sawit mentah dari Indonesia. Adanya resolusi ini membuat citra industri hilir minyak sawit semakin buruk di mata internasional dan disertai dampak yang dirugikan. Dampak yang akan dirasakan nantinya pun datang dari beberapa faktor, baik dampak bagi lingkungan karena adanya deforestasi perluasan lahan minyak sawit serta dampak bagi ekspor minyak sawit kemasa yang akan datang. Namun dikhawatirkan dalam jangka menengah dan panjang, resolusi tersebut akan membawa konsekuensi yang cukup merugikan. Dampak pada umumnya merupakan suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Dalam konteks ini, dampak yang dimaksud adalah merupakan dampak pembangunan terhadap lingkungan yang mana bisa menjadi masalah karena perubahan yang disebabkan oleh pembangunan selalu lebih luas daripada yang menjadi sasaran pembangunan yang telah direncanakan.<sup>18</sup>

Padahal semua kegiatan yang telah direncanakan dalam pembangunan tersebut mulanya dimaksud untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, tetapi ternyata di sisi lain dapat menimbulkan dampak yang justru merugikan

---

<sup>17</sup> <https://www.kemlu.go.id>, dalam “Tanggapan Atas Resolusi Parlemen Eropa Tentang Minyak Sawit” (diakses pada 11 Maret 2018, pukul 18:36)

<sup>18</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997) hlm.38

kelangsungan hidup baik manusia maupun satwa. Sehingga keseimbangan lingkungan dapat terganggu oleh kegiatan pembangunan. Apabila keseimbangan lingkungan terganggu maka kualitas lingkungan juga dapat berubah. Padahal kenyamanan hidup banyak ditentukan oleh daya dukung alam atau kualitas lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup manusia.<sup>19</sup> Namun hal tersebut masih secara umum jika dilihat dari sisi adanya dampak kerusakan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan (deforestasi) terutama pada perkebunan kelapa sawit, dapat dibagi menjadi beberapa dampak. Sebagai contohnya, dampak sosial, dampak lingkungan serta dampak ekspor minyak sawit Indonesia di tengah adanya isu kerusakan lingkungan tersebut.

Jika dilihat dari dampak sosial, adanya akibat dari perkebunan kelapa sawit. Sebagai proses kegiatan yang berkelanjutan memiliki dampak yang luas bagi kehidupan Masyarakat. Dampak tersebut meliputi perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap ekosistem, yaitu terganggunya keseimbangan lingkungan alam dan kepunahan keanekaragaman hayati (biodiversity). Adanya dampak sosial budaya yang ditimbulkan karena efek dari pembangunan kelapa sawit, baik pula dari adanya perubahan kebiasaan budaya masyarakat yang telah lama mengandalkan hutan, sungai dan alam. Namun kini, keterbatasan untuk memanfaatkan hutan berkurang dikarenakan, adanya keserakahan dari perusahaan dalam mengelolala hampir semua hutan tersebut. Kemudian adanya dampak lingkungan akibat dari perluasan minyak sawit tersebut ialah, pencemaran air, udara dan tanah. Selain itu, kelapa sawit sangat erat dengan sumber-sumber emisi gas rumah kaca dari proses produksi dan rantai pasok minyak sawit yang mengakibatkan rusaknya fungsi dan kemampuan serapan gas rumah kaca oleh lahan, hutan, dan gambut, termasuk gas-gas yang dihasilkan dari

---

<sup>19</sup> Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995) hlm. 23

pabrik minyak sawit dan bahan bakar fosil aktifitas mesin pabrik dan perkebunan kelapa sawit.<sup>20</sup>

Selain adanya dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan akibat adanya perkebunan kelapa sawit. Ekspor tentunya juga akan menjadi dampak akibat adanya kerusakan lingkungan secara langsung maupun dampak yang diakibatkan karena adanya kampanye tersebut. kampanye negatif terhadap minyak sawit Indonesia, tentunya akan mengawatirkan eksistensi ekspor minyak sawit dipasar dunia. Namun pada kenyataannya, adanya kampanye tersebut tentu berpengaruh besar terhadap ekspor minyak sawit mentah, terhadap publik internasional terutama bagi negara-negara pengimpor minyak sawit. Bagaimana tidak, banyaknya kampanye yang menyatakan bahwa minyak sawit dalam perluasan lahannya dapat merusak lingkungan serta produksi sawit yang tidak sehat. Ekspor minyak sawit mengalami naik turun nilai ekspor setiap tahunnya, yang dicuragai penurunan tersebut diakibatkan karena adanya isu deforestasi terhadap minyak sawit Indonesia, berikut tabelnya:

**Gambar 3.6**  
**Ekspor minyak sawit Indonesia setiap tahunnya**



<sup>20</sup> <http://www.tuk.or.id>, dalam “Dampak Kelapa Sawit”, (diakses pada 12 Maret 2018 pukul 9:29)

Sumber data : United States Department of Agriculture<sup>21</sup>

Pada tahun 2015 merupakan tahun yang harus dilewati produksi minyak sawit penuh dengan tantangan, dimulai dari harga minyak sawit mentah atau CPO secara global tidak bergairah hingga adanya kasus kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit. Sehingga harga rata-rata minyak sawit global sepanjang tahun 2015 mengalami penurunan, tidak mampu mencapai US\$ 700 per metrik ton. Harga rata-rata minyak sawit mentah tahun 2015 hanya mencapai US\$ 641,2 per metrik ton. Harga tersebut rata-rata turun sebesar 25% dibandingkan dengan harga rata-rata pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 yang telah mencapai US\$ 818,2 per metrik ton.<sup>22</sup> Adanya isu deforestasi ataupun kampanye negatif terhadap persawitan Indoneisa tentunya akan berdampak juga pada kualitas dan ekspor minyak sawit Indonesia. Sehingga kampanye-kampanye tersebut dianggap sebagai ancaman.

Apabila kampanye tersebut dapat mengambil alih atau meracuni pikiran sebuah negara untuk nantinya tidak mengimpor minyak sawit, dikarenakan adanya kampanye negatif yang mengatakan bahwa industri sawit Indonesia tidak ramah lingkungan, dan menyebabkan deforestasi. Tentunya kampanye tersebut menjadi kekhawatiran apabila terus meluas dan berkembang. Dikhawatirkan nantinya akan semakin memburuk citra minyak sawit dipasar dunia. Sehingga, diperlukannya upaya atau strategi pemerintah Indonesia agar dapat mempertahankan Indonesi sebagai negara produsen dan eksportir terbesar serta mampu meminimalisir bahkan menghapuskan adanya kampanye-kampanye yang melontarkan stigma negatif terhadap persawitan Indonesia.

---

<sup>21</sup> <https://www.fas.usda.gov>, dalam "Indonesia Palm Oil Exports by Year", (diakses pada 09 November 2017 pukul 3:02)

<sup>22</sup> <https://gapki.id>, dalam "Refleksi Industri kelapa sawit 2016 dan prospek 2016, (diakses pada 12 Maret 2018, pukul 9:49)